

**KEMISKINAN PERDESAAN DI KABUPATEN WONOSOBO**  
**(Studi Kasus di Desa Purwosari Kecamatan Kaliwiro Kabupaten**  
**Wonosobo)**

**Firstananda Putri Feby'**

**Email: firstananda22@gmail.com (085801940750)**

**Dosen Pembimbing 1: Dr. Dra. Kushandajani M.A. (0811276862)**

**Email : ningkisworo123@gmail.com**

**Dosen Pembimbing 2: Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP., M.Si (0816651925)**

**Email : dgmanar@gmail.com**

**Departemen Politik dan Pemerintahan**

**Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro**

**ABSTRAK**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan kronis. Kabupaten Wonosobo masih mengalami kemiskinan yang cukup tinggi, khususnya kemiskinan perdesaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Desa Purwosari Kabupaten Wonosobo dari perspektif demokrasi sosial.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui Wawancara, dan Studi Pustaka. Untuk menganalisisnya, penelitian ini menggunakan teori paradigma demokrasi sosial dengan menggunakan lima konsep penyebab kemiskinan (struktur sosial, institusi/lembaga, ketidakadilan, ketimpangan, dan tertutupnya akses-akses dalam memperoleh sumber kemampuan).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab tingginya tingkat kemiskinan di Desa Purwosari Kabupaten Wonosobo disebabkan oleh institusi/lembaga dan ketimpangan. Pertama, Institusi/lembaga. Terkiat dengan Institusi/lembaga disebabkan oleh Pemerintah Desa Purwosari belum mampu memberikan jaminan dan bantuan sosial dengan tepat sasaran, pembangunan infrastruktur fisik belum diimbangi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), penanggulangan kemiskinan belum menjadi bidang prioritas dalam APBDes serta belum adanya Peraturan Desa (Perdes) yang digunakan untuk urusan penanggulangan kemiskinan. Kemudian, fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) kurang optimal dalam memberdayakan masyarakat. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwosari juga belum mampu memperkuat perekonomian masyarakat. Kedua, ketimpangan. Ketimpangan dipengaruhi oleh faktor internal yaitu rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan faktor eksternal yaitu minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Desa Purwosari.

**Kata Kunci : Kemiskinan, Penyebab Kemiskinan, dan Perdesaan**

**RURAL POVERTY IN WONOSOBO REGENCY**  
**(Case Study in Purwosari Village, Kaliwiro District, Wonosobo Regency)**

*Firstananda Putri Feby'*

*Email: firstananda22@gmail.com (083801940750)*

*Dosen Pembimbing 1: Dr. Dra. Kushandajani M.A. (0811276862)*

*Email: ningkisworo123@gmail.com*

*Dosen Pembimbing 2: Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP., M.Si (0816651925)*

*Email : dgmanar@gmail.com*

*Department of Politics and Government*

*Faculty of Social and Political Sciences, Diponegoro University*

**ABSTRACT**

*Poverty is a complex and chronic problem. Wonosobo Regency still experienced high poverty, especially rural poverty. This study aims to analyze the factors that cause high poverty in the village of Purwosari Regency Wonosobo from the perspective of social democracy.*

*This study uses a qualitative descriptive method with data collection techniques carried out through interviews and documentation. To analyze it, this study uses the theory of social democracy paradigm using five concepts of poverty causes (social structures, institutions / institutions, injustices, inequality, and closom access to access in obtaining sources of ability).*

*The results showed that the factors causing the high level of poverty in the village of Purwosari Regency Wonosobo was caused by institutions / institutions and inequality. First, institutions / institutions. Institutions / institutions caused by the Purwosari Village Government have not been able to provide guarantees and social assistance on target, the construction of physical infrastructure has not been offset by the construction of human resources (HR), poverty reduction has not become a priority field in the APBDES and the absence of village regulations (Perdes ) which is used for poverty reduction matters. Then, the functions of the Village Community (LKD) institutions are less than optimal in empowering the community. Village-Owned Enterprises (Bumdes) in Purwosari Village also have not been able to strengthen the economy of the community. Second, inequality. Inequality is influenced by internal factors, namely the low quality of human resources (HR) and external factors, namely the lack of availability of employment in Purwosari Village.*

***Keywords: poverty, causes of poverty, and rural***

## **Pendahuluan**

Salah satu permasalahan yang menjadi penghalang untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat adalah kemiskinan. Kemiskinan bukan hanya diartikan pada tidak mampu dalam hal perekonomian saja, namun tentang gagal terpenuhinya berbagai hak dasarnya seperti halnya pendidikan, kesehatan, dan perbedaan perlakuan dalam menjalani kehidupan yang bermartabat (Manurung, 2015: 1). Di Indonesia permasalahan mengenai kemiskinan juga masih terus terjadi. Bersumber pada informasi dari Badan Pusat Statistik (BPS) total penduduknya yang tergolong miskin di Indonesia di tahun 2020 menggapai 26, 42 juta orang. Jumlah tersebut hadapi peningkatan sebanyak 1, 63 juta jiwa dari keseluruhan populasinya dibandingkan pada tahun 2019. Dipaparkan pula kemiskinan di pedesaan senantiasa menggapai presentase diatas 12 persen, sebaliknya di perkotaan cuma pada kisaran 7 persen.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Jawa Tengah menjadi salah satu provinsi di Indonesia yang penduduknya banyak masuk dalam kategori miskin. Pada bulan September tahun 2020, total penduduk miskin di Jawa Tengah mencapai 4, 12 juta orang. Dari angka tersebut, angka kemiskinan perdesaan di Jawa

tengah ternyata juga mengalami kenaikan sebanyak 2,23 juta orang pada bulan September 2020 dari 2,18 juta orang pada bulan Maret 2020. Berkaitan dengan hal tersebut, Kabupaten Wonosobo sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah juga tidak terlepas dari permasalahan kemiskinan yang diderita oleh masyarakat setempatnya. Pada tahun 2018 Kabupaten Wonosobo menduduki urutan pertama dengan jumlah penduduk miskinnya paling banyak pada Provinsi Jawa Tengah dengan persentasenya sebesar 17,58 persen (Sunandar, wonosobo.sorot.com, 2019). Kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Wonosobo banyak terjadi di perdesaan. Hal ini mengacu pada laporan tahunan kinerja desa periode tahun sebelumnya dan berdasar atas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang menerangkan bahwa kondisi zona merah kemiskinan Kabupaten Wonosobo terakumulasi di desa (radarsemarang.jawapos.com, 2019).

Desa Purwosari yang terletak di Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo termasuk desa dimana masih mengalami ketertinggalan sebagai akibat kemiskinan. Mengacu pada pengukuran kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS), p PPLS 2008 Pemerintah Desa Purwosari melakukan pemetaan kesejahteraan lokal Desa Purwosari

tahun 2018 dengan menggunakan 16 indikator, diantaranya: pekerjaan, pendapatan, kepemilikan lahan, alat transportasi, kepemilikan rumah, kesehatan, pendidikan, usaha, sanitasi rumah, kepemilikan ternak, kepemilikan aset berharga, tabungan, energi masak, difabel ataupun cacat, asupan gizi, serta hutang yang diperoleh dengan adanya musyawarah desa yang menyertakan keterlibatan semua elemen masyarakatnya dengan tidak ada pengecualian apapun (RPJM Desa Purwosari 2019-2024). Hasil pemetaan membagi masyarakat menjadi beberapa kriteria yaitu :

- a. Pra Sejahtera ialah keadaan ekonomi dalam rumah tangganya tergolong keluarga dengan sangat miskin.
- b. Sejahtera 1 (satu) ialah rumah tangga yang tergolong keluarga dengan kategori miskin.
- c. Sejahtera 2 (dua) ialah rumah tangga dimana dianggap sanggup untuk mencukupi kebutuhan dasar hidupnya ataupun tergolong keluarga sedang.
- d. Sejahtera Plus ialah rumah tangga dimana tergolong keluarga kaya (RPJM Desa Purwosari 2019-2024).

Dari pengukuran tersebut, tercatat bahwa dari seluruh total 447 KK atau jumlah rumah tangga pada tahun 2018, total rumah tangga dengan kategori pra-sejahtera

mencapai 11%, dengan kategori sejahtera 1 (satu) sebanyak 45%, dengan kategori sejahtera 2 (dua) sebanyak 36%, sementara dengan kategori sejahtera plus hanya mencapai 8%. Angka ini menunjukkan bahwa kemiskinan hampir mendominasi kehidupan masyarakat di Desa Purwosari. Sebab presentase masyarakat sangat miskin dan miskin jika digabung mencapai angka 56% yang berarti separuh lebih dari masyarakat desa purwosari belum memenuhi kebutuhan dasar hidup.

Kemudian, pada tahun 2019 dari seluruh total 417 KK, presentase masyarakat sangat miskin dan miskin di Desa Purwosari jika digabung masih mencapai 162 keluarga atau sejumlah 39%. Pada tahun 2020, presentasi keluarga miskin di Desa Purwosari masih mencapai 173 keluarga dari total 438 KK. Sebagai desa yang memiliki fenomena dengan persentase angka kemiskinan yang sampai saat ini masih cukup tinggi, maka perihal yang begitu menarik serta diperlukan penelitian. Faktor penyebab kemiskinan bisa disebabkan oleh faktor struktural, faktor kultural, faktor geografis, hingga peran institusi/ lembaga. Oleh sebab itu, peneliti akan mencoba untuk menggali lebih dalam akar penyebab dari kemiskinan perdesaan yang terjadi di Desa Purwosari.

## Landasan Teori

### 1. Konsep Kemiskinan

Ellis mengungkapkan terkait kemiskinan yang diartikan dengan suatu konsep dengan berwayuh wajah, bermantra multi-dimensional (Waluyo, 2006: 130-131). Menurut Arsyad, terdapat dua jenis ukuran kemiskinan yang umum dipergunakan yakni kemiskinan relatif serta absolut (Wulandari, 2016) :

#### 1) Kemiskinan absolut

Yakni bersumber pada tidak mempunyai individu yang memadai kebutuhan pokok minimumnya semacam sandang, pangan, perumahan, kesehatan serta pembelajaran dimana dibutuhkan untuk bekerja maupun hidupnya.

#### 2) Kemiskinan Relatif

Individu yang telah mempunyai tingkatan pemasukan dimana bisa memenuhi kebutuhan dasar minimumnya yang tidak begitu berarti disebut “tidak miskin”. Meskipun pemasukan telah menggapai tingkatan kebutuhan dasar minimumnya, namun masih jauh lebih rendah dibanding kondisi warga pada sekelilingnya, individu itu tetap tergolong dengan kondisi miskin.

Ada terminologi lain dalam kemiskinan yaitu kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Adapun kemiskinan struktural diartikan dengan keadaan dimana mencuat sebagai suatu konsekuensi dari struktur sosialnya dengan secara rumit menimbulkan warga yang marjinal serta susah mendapatkan akses untuk bermacam kesempatan (Purwandari, 2011: 27). Kemudian, Effendi menjelaskan bahwa kemiskinan kultural awalnya dicetuskan oleh Oscar Lewis dimana mendapati munculnya kemiskinan disebabkan oleh berbagai nilai maupun kebudayaan dari masyarakat miskinnya (Palikhah, 2016: 11).

### 2. Faktor- Faktor Penyebab Kemiskinan Perdesaan

Beberapa faktor yang menyebabkan munculnya kemiskinan dijelaskan dalam paradigma atau *grand theory* demokrasi sosial. Demokrasi sosial berupaya memperbaiki dan mengakomodasi dua buah pemikiran ideologi sebelumnya yaitu pertama, kapitalisme yang bersifat eksploitatif dan terbuka. Kedua, sosialisme yang bersifat tertutup dan anti eksploitasi. Demokrasi sosial mencoba mengadopsi kebebasan dari kapitalisme dan mengadopsi prinsip keadilan dalam sosialisme (Warganegara, tanpa tahun: 1). Eduard Bernstein merupakan tokoh

demokrasi sosial klasik. Kelanjutan demokrasi sosial diperbaharui oleh Giddens sebagai pemikir demokrasi sosial baru. Kemudian, (Meyer, 2008: 18) yang mengungkapkan bahwa :

“Demokrasi sosial biasanya dicirikan dengan negara yang memiliki kesejahteraan sosial komprehensif, yang menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar, pemerintahan memiliki komitmen untuk menjamin kesetaraan kesempatan dan keadilan, tidak hanya dalam bidang politik namun juga di dalam kehidupan ekonomi dan sosial.”

Penyebab kemiskinan dijelaskan dalam teori demokrasi sosial. Paradigma tersebut tidak memandang suatu kemiskinan sebagai masalah seseorang, akan tetapi kepada masalah strukturalnya (Cheyne, O’Brien serta Belgrave 1998; Febrianti, 2015: 73). Berikut adalah tabel tentang kemiskinan dalam demokrasi sosial :

**Demokrasi Sosial tentang Kemiskinan**

<b>Paradigma</b>	<b>Demokrasi Sosial</b>
Landasan Teori	Struktural
Konsep serta Indikator Kemiskinan	Kemiskinan Relatif
Penyebab Kemiskinan	Ketimpangan struktur perekomian serta politik; tidak adilnya ranah sosial; kurangnya intervensi pemerintah

Strategi Penanggulangan Kemiskinan	Proses menyalurkan pendapatan dasar yang dilakukan universal; perubahan fundamental pada berbagai pola dalam mendistribusikan pendapatannya dengan campur tagan negara maupun kebijakan sosialnya.
------------------------------------	--

**Sumber : Cheyne,O’Brien dan Belgrave,1998 dalam Roostartina (2013)**

Demokrasi sosial lebih menekankan dimana sebuah kemiskinan merupakan akibat dari kurangnya akses yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakatnya dalam pemenuhan kesejahteraan, adanya ketimpangan dan ketidakadilan pada masyarakatnya mencakup pada bidang politik maupun ekonomi. Bagi demokrasi sosialnya terkuncinya berbagai akses untuk suatu kelompok yang menjadi faktor yang menyebabkan timbulnya kemiskinan kebebasan (Febrianti, 2015: 73).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori paradigma demokrasi sosial untuk meneliti faktor- faktor apa saja sebagai penyebab tingkat kemiskinan di Desa Purwosari. Sebab, melalui demokrasi sosial dapat membantu menganalisis bahwa pangkal penyebab kasus kemiskinan tidak hanya dilihat dari satu sisi semata, namun bagaimana struktural serta institusi/lembaga dalam

masyarakat juga memegang peran penting didalamnya.

## **Metode**

Penelitian menggunakan jenis pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian ini akan menghasilkan data berupa hasil analisis serta deskriptif yang berdasarkan atas pendapat dari peserta penelitian atau partisipan baik lisan maupun tertulis, serta beberapa data pendukung. Sumber data berasal dari sumber data primer yaitu Pemerintah Desa Purwosari dan sumber data sekunder yaitu dokumen, tulisan, arsip-arsip, gambar serta data pendukung lainnya yang terdapat pada lembaga/instansi terkait. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Kemudian, dianalisis melalui *Data Reduction* (Reduksi Data), *Data Display* (penyajian data), dan *Conclusion Drawing* (Kesimpulan Verifikasi).

## **Pembahasan**

### **1. Temuan Hasil Penelitian**

Temuan dari hasil penelitian mengungkapkan terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan di Desa Purwosari, yaitu :

### **Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)**

Berdasarkan hasil penelitian, ternyata Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat di Desa Purwosari masih cukup rendah. Berdasarkan sumber dari RPJMDesa Purwosari tahun 2019- 2024, terlihat bahwa memang tingkat kesadaran dan kemampuan masyarakat di Desa Purwosari pada aspek pendidikan masih cukup rendah. Dari total 1626 jiwa penduduk di tahun 2018, sejumlah 936 masyarakat di Desa Purwosari hanya menempuh pendidikan hingga jenjang Sekolah Dasar (SD) saja (RPJMDesa Purwosari 2019-2024). Selain itu, masyarakat yang menempuh pendidikan hanya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sejumlah 449 masyarakat. Jika dibandingkan dengan masyarakat yang menempuh pendidikan S1-S3 yang hanya sejumlah 36 masyarakat, angka tersebut sangat timpang. Wujud dari Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Purwosari yang rendah, juga terlihat dalam keseharian masyarakat yang belum mampu mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dengan optimal. Masyarakat di Desa Purwosari yang mayoritas bekerja pada sektor pertanian, sampai saat ini masih mengelola dengan cara sederhana dan tradisional. Hasil pertanian yang didapatkan hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, masyarakat belum

mampu mengelola menjadi suatu barang yang memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

### **Pendataan dan Penyaluran Penerima Jaminan dan Bantuan Sosial**

Berdasarkan data dari Penerima Bantuan Sosial Desa Purwosari 2021, diketahui bahwa masih banyaknya bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat di Desa Purwosari yang tidak tepat sasaran baik dalam bentuk bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Penerima Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), PBI APBN NON DTKS, BPI APBD II, dan lainnya. Dari total 820 masyarakat penerima bantuan sosial di Desa Purwosari, sejumlah 55 bantuan ternyata masih tidak tepat sasaran, baik karena sudah meninggal, pindah domisili, data ganda, penerima merupakan orang kaya, dan bahkan nama penerima tidak ditemukan sebagai masyarakat di Desa Purwosari. Ketidaktepatan sasaran penerima manfaat bantuan sosial menyebabkan masyarakat miskin yang harusnya mendapatkan bantuan untuk harapan bisa membantu mendukung kebutuhan, meningkatkan daya beli, serta memberdayakan dirinya tidak bisa tercapai.

### **Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Memperkuat Perekonomian Masyarakat**

Di Desa Purwosari, BUMDes yang diberikan nama “BUMDes Makmur Jaya” baru bisa dibentuk pada tanggal 8 Juni 2019. Anggota BUMDes di Desa Purwosari masih merasa bingung dan kesulitan dalam menentukan roadmap keberjalanan program-programnya. BUMDes yang seharusnya mampu mengelola potensi milik desa secara kolektif seperti Sumber Daya Alam (SDA) dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga desa serta menyangga pelaku-pelaku ekonomi mikro di tingkat desa juga belum dapat tercapai. Peran BUMDes yang belum optimal tersebut, pada akhirnya membawa dampak kesulitan masyarakat dalam upaya meningkatkan kemampuannya yang menyebabkan terjadinya kemiskinan.

### **Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Fisik dengan Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM)**

Banyak sekali pembangunan fisik yang sudah berhasil dilaksanakan di Desa Purwosari. Pada tahun 2019 terdapat pembangunan jalan usaha tani, drainase, dan pengaspalan jalan tahun 2019. Pada tahun 2020 terdapat pembangunan kantor

Pemerintahan Desa Purwosari, dan saat ini pada tahun 2021 sedang dibangun GOR serba guna. Namun, pembangunan fisik yang terus dilaksanakan pada setiap tahunnya di Desa Purwosari, belum mampu diimbangi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Aset Sumber Daya Manusia (SDM) di Desa Purwosari terdiri dari beragam latar belakang profesi, yakni: pengrajin batu, guru, penjahit, tukang kayu, pengrajin tempe, gula, tukang pijat, petani, buruh tani, dan lainnya (RPJMDesa Purwosari 2019-2024). Beragamnya asset Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki masyarakat di Desa Purwosari tentu membutuhkan dukungan untuk terus mengalami kemajuan. Kurangnya dukungan dalam pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada akhirnya berujung pada permasalahan kemiskinan.

### **Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam Memberikan Program Pengentasan Kemiskinan**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) seharusnya disusun dengan memperhatikan prioritas kebutuhan masyarakat. Mengingat kemiskinan masih terus terjadi di Desa Purwosari, maka seharusnya APBDesa bisa dimanfaatkan untuk menanggulangi permasalahan kemiskinan. Di Desa Purwosari sampai pada

tahun 2021, hanya ada satu program yang digunakan sebagai upaya penanggulangan kemiskinan, yaitu program Pembangunan/ Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang bahkan dananya hanya mencukupi untuk pembangunan satu rumah saja (Data APBDes 2021 Desa Purwosari). Dari tahun ke tahun anggaran APBDesa yang digunakan untuk belanja program pembangunan Rumah Tidak Layak Huni juga justru semakin rendah, padahal pendapatannya semakin meningkat. Pada APBDes tahun 2021, dari total jumlah pendapatan Rp.1.409.285.061,00, sejumlah Rp.918.550.802,00. digunakan untuk program program pembangunan. Pembangunan RTLH juga termasuk dalam belanja pembangunan sub bidang Kawasan permukiman. Namun, jumlahnya cukup sedikit hanya Rp.12.000.000 dari Rp.918.550.802,00. Belanja dalam bidang pelaksanaan pembangunan lebih banyak dialokasikan untuk sub bidang lainnya misalnya digunakan untuk bantuan honor pengajar dan penyelenggaraan posyandu. Dari hal tersebut, terlihat bahwa memang APBDes di Desa Purwosari yang dianggarkan untuk permasalahan kemiskinan masih sangat rendah, dan belum mampu memberikan dampak yang optimal terhadap harapan berkurangnya keluarga kemiskinan di Desa Purwosari.

## **Peraturan Desa (Perdes) yang Digunakan untuk Urusan Penanggulangan Kemiskinan**

Pada dasarnya, penanggulangan kemiskinan bisa diatasi oleh kewenangan desa. Pemerintah desa bisa membuat aturan atau langkah-langkah strategis yang diharapkan mampu menurunkan angka kemiskinan, dalam hal ini bisa melalui Peraturan Desa (Perdes). Akan tetapi, di Desa Purwosari sampai pada tahun 2021 belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang bisa digunakan sebagai upaya penanggulanga kemiskinan. Hal ini tentu mempengaruhi strategi dan kinerja Pemerintah Desa Purwosari dalam mengatasi permasalahan kemiskinan, sebab tidak memiliki aturan dasar untuk bisa dijadikan landasan dalam melaksanakan berbagai program yang dikhususkan untuk persoalan kemiskinan sehingga masih sulit untuk mempercepat penurunan angka kemiskinan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin.

## **Peran Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam Mendukung Kesejahteraan Masyarakat**

Lembaga Kemaasyarakatan Desa (LKD) memiliki beberapa tugas penting

seperti dalam pengawasan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. Di Desa Purwosari terdapat beberapa Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) diantaranya TIM Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), dan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD). Dalam RPJMDesa Purwosari tahun 2019-2024 dikatakan bahwa lembaga KPMD dalam proses pengkaderan pemberdayaan bagi masyarakat masih kurang optimal dan lembaga LPMD belum memiliki sinergi dengan pemerintah desa dalam melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan yang dilakukan oleh TP-PKK juga masih sebatas memberdayakan anggota itu sendiri. Masyarakat belum sepenuhnya mendapatkan manfaat dari adanya LKD di Desa Purwosari, terutama keluarga miskin yang seharusnya menjadi prioritas kegiatan pemberdayaan. Sejak LPMD dan KPMD dibentuk, belum ada program yang dihasilkan untuk masyarakat. LKD di Desa Purwosari seakan mangkrak dan perannya belum dirasakan oleh masyarakat.

## **Ketersediaan Lapangan Pekerjaan Di Desa Purwosari**

Lapangan pekerjaan merupakan wadah masyarakat untuk memenuhi

kebutuhan hidupnya. Lapangan pekerjaan di Desa Purwosari sebenarnya sudah ada, namun hanya pada sektor pertanian saja, sementara gaji menjadi seorang petani dan buruh tani sangatlah stagnan dengan upah rendah. Pendapatan masyarakat dari sektor pertanian masih cukup rendah, dimana jumlah pendapatan perkapita untuk setiap rumah tangga hanya sejumlah Rp 1.250.000, 00 angka tersebut bahkan dibawah Upah Minimum Kabupaten/kota (UMK) Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 yang sejumlah Rp. 1.859.000,00. Selain pertanian, lapangan pekerjaan yang memungkinkan di Desa Purwosari adalah menjadi buruh harian lepas, tukang bangunan, dan tukang kayu. Namun, pekerjaan tersebut juga belum mampu memberikan pendapatan yang tinggi. Selain itu, masyarakat di Desa Purwosari belum memiliki akses yang baik terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Masyarakat belum mampu memberdayakan dirinya dan tidak memiliki modal yang cukup untuk mendirikan UMKM sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupannya. Ketersediaan lapangan pekerjaan di Desa Purwosari yang sangat terbatas jumlahnya tidak mampu menyerap tenaga kerja yang jumlahnya terus bertambah pada setiap tahunnya, hal ini membuat masyarakat sulit

memenuhi kebutuhan hidupnya yang pada akhirnya menyebabkan kemiskinan.

## **2. Faktor Penyebab Kemiskinan di Desa Purwosari Ditinjau dari Teori Paradigma Demokrasi Sosial**

Dalam kerangka teori paradigma demokrasi sosial menggunakan lima konsep dalam melihat faktor penyebab kemiskinan yaitu Struktur Sosial, Institusi/lembaga, Ketidakadilan, Ketimpangan, dan Tetutupnya Akses- Akses dalam Memperoleh Sumber Kemampuan. Berikut uraiannya:

### **Faktor Penyebab Kemiskinan dari Struktur Sosial**

Faktor penyebab kemiskinan dari konsep struktur sosial berdasarkan hasil penelitian, ternyata tidak ditemukan di Desa Purwosari. Struktur sosial di Desa Purwosari cukup baik, masyarakat sampai sekarang masih menerapkan nilai- nilai gotong royong, kebersamaan, solidaritas, dan kepedulian yang cukup baik. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam teori demokrasi sosial bahwa kebersamaan yang nyata antara lembaga dan struktur kemasyarakatan menjadikan solidaritas berkembang dan dapat menjadi pupuk bagi keamanan sosial (Gombert, 2010: 37). Di Desa Purwosari tidak terdapat sistem kasta maupun tingkatan atau

pelapisan masyarakat yang bisa menjadi penyebab munculnya stratifikasi. Kemudian, tatanan sosial masyarakat di Desa Purwosari cukup mematuhi aturan, hukum, dan norma yang berlaku. Kekacauan, pergolakan, maupun tindak kriminalitas sangat jarang ditemukan di Desa Purwosari. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur sosial tidak menjadi faktor penyebab kemiskinan di Desa Purwosari.

### **Faktor Penyebab Kemiskinan dari Institusi/lembaga**

Eduard Bernstein berpendapat bahwa negara demokrasi bertanggungjawab untuk memperhatikan keperluan- keperluan serta kebebasan rakyat (Warganegara, tanpa tahun: 80). Akan tetapi, institusi/lembaga yang ada di Desa Purwosari belum mampu bertanggung jawab dalam membantu memenuhi keperluan masyarakat, terutama keluarga miskin. Berdasarkan hasil penelitian, ternyata institusi/lembaga yang ada di Desa Purwosari justru menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Institusi/lembaga tersebut yaitu Pemerintah Desa, Lembaga kemasyarakatan Desa (LKD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Pertama, Pemerintah Desa. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan Pemerintah Desa Purwosari menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Ketidaktepatan

Pemerintah Desa Purwosari dalam melakukan pendataan sasaran penerima jaminan dan bantuan sosial mengakibatkan bantuan sosial yang ada di Desa Purwosari belum mampu memberikan perlindungan masa depan bagi keluarga miskin di Desa Purwosari. Selain itu, penanggulangan kemiskinan belum menjadi bidang prioritas dalam APBDes di Desa Purwosari. Sampai pada APBDes tahun 2021, pembagian anggaran yang ditetapkan masih belum bisa berkontribusi secara signifikan dalam menetapkan program penanggulangan kemiskinan. Kemudian, Pemerintah Desa Purwosari selama ini juga belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang bisa digunakan untuk urusan penanggulangan kemiskinan. Hal tersebut mengakibatkan sulitnya merencanakan program penanggulangan kemiskinan dengan serius, sebab tidak memiliki landasan hukumnya. Selain itu, Pemerintah Desa Purwosari dalam melaksanakan pembangunan masih terlalu fokus pada bidang pembangunan infrastruktur fisik saja. Pembangunan di Desa Purwosari belum diimbangi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) yang mengakibatkan masyarakatnya sulit mendapatkan kesempatan/kemampuan untuk mengembangkan berbagai kemampuannya. Kedua, Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD). Lembaga kemasyarakatan yang ada di

Desa Purwosari belum mampu menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam pengawasan pembangunan, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan melakukan pemberdayaan masyarakat. LPMD, LKPMD, maupun TP-PKK belum mampu memberikan program- program yang dapat menanggulangi permasalahan kemiskinan. Ketiga, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Giddens menyampaikan bahwa sebagaimana prinsip dalam demokrasi sosial, intervensi negara atas pasar sangat diperlukan untuk mengontrol dan menyeimbangkan kegiatan pasar (Warganegara, tanpa tahun: 72). Dalam hal ini, pemerintah desa dapat membentuk lembaga BUMDes sebagai lembaga sosial dan komersial desa dalam usaha mendukung kebutuhan pasar dan potensi desa. Keberadaan BUMDes di Desa Purwosari belum mampu menjadi sebuah lembaga ekonomi yang mampu memperkuat perekonomian masyarakat.

### **Faktor Penyebab Kemiskinan dari Ketidakadilan**

Keadilan dalam demokrasi sosial berdasarkan hasil kongres Hamburg menjadi sebuah landasan pentingnya harga diri setiap manusia, tidak tergantung pada asal-usul dan kelamin (Gombert, 2010: 36). Kerukunan masyarakat di Desa Purwosari cukup baik,

tidak ada kelompok masyarakat yang mendapatkan prasangka negatif secara subjektif seperti dalam bidang ras, jenis kelamin, maupun agama. Masyarakat kompak dalam kegiatan yang rutin diadakan seperti gotong royong, kerja bakti, dan saling tolong-menolong. Seluruh masyarakat di Desa Purwosari menyatu dan hidup berdampingan. Berdasarkan pemaparan dari para narasumber, masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian dan profesi yang terbilang rendah tidak akan terpinggirkan oleh masyarakat yang lebih berkecukupan, masyarakat memiliki simpati dan empati yang cukup kuat terhadap sesama.

Masyarakat di Desa Purwosari tidak ada yang memegang kekuasaan sewenang-wenang atas kelompok masyarakat yang lain. Dari penjelasan tersebut, maka tidak ditemukan suatu tindak stereotip, marginalisasi, maupun dominasi yang menciptakan suatu ketidakadilan sebagai faktor penyebab kemiskinan di perdesaan. Sehingga, kemiskinan di Desa Purwosari tidak disebabkan oleh konsep ketidakadilan dalam kerangka teori paradigma demokrasi sosial.

### **Faktor Penyebab Kemiskinan dari Ketimpangan**

Ketimpangan terbagi atas faktor internal dan faktor eksternal. Di Desa

Purwosari, ternyata ketimpangan menjadi faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Pertama, disebabkan oleh ketimpangan dari faktor internal yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang masih rendah. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah di Desa Purwosari berkaitan dengan tingkat pendidikan masyarakat yang masih minim, dimana mayoritas masih lulusan Sekolah Dasar (SD) saja. Sumber Daya Manusia (SDM) yang rendah juga berujung pada ketidakmampuan masyarakat dalam mengelola Sumber Daya Alam (SDA) dengan lebih baik.

Kedua, disebabkan oleh ketimpangan dari faktor eksternal, dalam hal ini dipengaruhi oleh kurangnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Desa Purwosari. Negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan kesejahteraan masyarakat berbasis hak, salah satunya hak memperoleh pekerjaan, pembayaran yang adil, serta kondisi kerja yang layak (Meyer, 2008: 14-16). Masyarakat di Desa Purwosari masih kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Kegiatan ekonomi produktif di Desa Purwosari masih sangat terbatas ragam dan jumlahnya. Berdasarkan data dari tingkat perkembangan Desa Purwosari, tercatat bahwa pada tahun 2020 dari 84 angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun), sejumlah

51 orang bekerja tidak menentu, 8 orang cacat dan tidak bekerja, 7 orang masih sekolah dan tidak bekerja, Sulitnya mencari pekerjaan juga menyebabkan Desa Purwosari pada tahun 2020 masih masuk dalam klasifikasi Desa Swadaya yang berarti desa tersebut kekurangan Sumber Daya Manusia (SDM). Selain itu, juga tergolong dalam desa madya yang berarti sebenarnya desa tersebut memiliki aset sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, akan tetapi belum mampu mengelola dengan optimal ([prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id](http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id)).

### **Faktor Penyebab Kemiskinan dari Tetutupnya Akses- Akses dalam Memperoleh Sumber Kemampuan**

Menurut Meyer, negara memiliki tanggung jawab untuk bertindak melakukan pembukaan akses, menjamin peluang terhadap infrastruktur publik, dan menyediakan kebutuhan hidup masyarakat (Gombert, 2010: 105). Akses- akses dalam memperoleh sumber kemampuan berupa aset fisik, aset Sumber Daya Manusia (SDM), aset finansial, dan aset lingkungan. Dalam hal akses terhadap aset fisik, misalnya pada sarana pendidikan di Desa Purwosari sudah ada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak- Kanak (TK), dan Sekolah Dasar (SD). Kemudian, sarana kesehatan di

Desa Purwosari terdapat Pondok Bersalin Desa (Polindes) dan dalam sarana kegiatan ekonomi terdapat toko kelontong, minimarket, dan tukang sayur pagi. Terkait dengan Aset Sumber Daya Manusia (SDM) walaupun memang masih terbilang cukup rendah dan kurang akan pemberdayaan, tetapi masyarakat memiliki akses dan kebebasan untuk menambah pengetahuan serta ketrampilannya. Kemudian, dalam aset finansial terdapat koperasi pertanian dan kelompok arisan. Terkait dengan aset lingkungan, di Desa Purwosari banyak sekali Sumber Daya Alam (SDA) yang bisa dimanfaatkan, misalnya Bukit Kapur Deselan, mata air Kalilekula, hasil pertanian, dan perkebunan. Berdasarkan keterangan tersebut, maka terdapat kesempatan masyarakat memperoleh akses- akses dalam menunjang sumber kemampuan. Sehingga tertutupnya akses- akses dalam memperoleh sumber kemampuan sebagai konsep penyebab kemiskinan dalam kerangka teori paradigma demokrasi sosial tidak menjadi faktor penyebab kemiskinan di Desa Purwosari.

## **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian penulis, dapat disimpulkan bahwa faktor- faktor apa saja sebagai penyebab terjadinya kemiskinan di Desa Purwosari Kabupaten

Wonosobo dalam perspektif teori paradigma demokrasi sosial disebabkan oleh Institusi/lembaga dan ketimpangan.

Pertama, Institusi/lembaga. Pemerintah Desa Purwosari belum mampu memberikan jaminan dan bantuan sosial dengan tepat sasaran. Selain itu, pembangunan infrastruktur atau fisik yang dibangun oleh Pemerintah Desa Purwosari juga belum diimbangi dengan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kemudian, penanggulangan kemiskinan belum menjadi bidang prioritas dalam APBDes di Desa Purwosari serta belum memiliki Peraturan Desa (Perdes) yang digunakan untuk urusan penanggulangan kemiskinan. Kemudian, masyarakat di Desa Purwosari belum merasakan fungsi dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dalam memberdayakan masyarakat sebagaimana tugas dan fungsinya. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Purwosari yang diharapkan mampu memperkuat perekonomian masyarakat, mendukung pembangunan desa, mengelola potensi desa, serta mengurangi kemiskinan juga ternyata belum bisa berjalan sesuai dengan harapan.

Kedua, ketimpangan. Ketimpangan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Dalam faktor internal, disebabkan oleh rendahnya kualitas Sumber Daya

Manusia (SDM) yang dimiliki oleh masyarakat di Desa Purwosari. Kemudian, dalam faktor eksternal, disebabkan oleh minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan di Desa Purwosari. Lapangan pekerjaan yang tersedia di Desa Purwosari mayoritas hanya pada bidang pertanian, dengan gaji atau upah yang masih rendah. Masyarakat miskin di Desa Purwosari terjebak pada tingkat pendapatan dan produktivitas yang masih rendah, sehingga masyarakat sulit memenuhi kebutuhan ekonominya dengan layak.

#### Daftar Pustaka

- Febrianti, Tintin. (2015). "Analisis Perbandingan Konsep Keberfungsian Sosial Dalam Pengentasan Kemiskinan Nelayan di Wilayah Pesisir". *Mimbar Agribisnis*, Vol. 1, No. 1,
- Giddens, Anthony (1999) *Runaway World: How Globalization is Reshaping Our Lives. London : Profile.*
- Gombert, Tobias, dkk. (2010). *Landasan Sosial Demokrasi*. Friedrich-Ebert-Stiftung
- Manurung, Feby Angelina. (2015). "Pemetaan Kemiskinan Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur". *jimfeb.ub.ac.id*, Vol. 4, No.2, hlm.1.
- Meyer, Thomas. (2008). *Demokrasi Sosial dan Libertarian Dua Model yang Bersaing dalam Mengisi Kerangka Demokrasi Liberal*. Jakarta: Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
- Palikhah, Nur. (2016). "Konsep Kemiskinan Kultural". *Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 15 No. 30, hlm. 11-27.
- Purwandari, Heru. (2011). "Respon Petani Atas Kemiskinan Struktural (Kasus Desa Perkebunan dan Desa Hutan)". *J-SEP*, Vol. 5, No. 2, hlm. 27.
- Waluyo, Dwi Eko. (2006). "Studi Tentang Bentuk Kemiskinan Penduduk Di Desa Cindogo Kecamatan Tapen Kab. Bondowoso". *Jurnal Humanity*, Vol. 1, No. 2, hlm. 130-131.
- Warganegara, Arizka. "Revisionisme Marxisme dan Perkembangan Ideologi Demokrasi Sosial (Studi Pemikiran Eduard Bernstein dan Anthony Giddens)". Dosen Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung
- Wulandari, Nike Roso (2016). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga Di Kota Kendari Tahun 2014". *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 1, hlm. 113.

#### Sumber Internet:

- "Kades Harus Fokus di Kemiskinan". (2019, Desember 17). <https://radarsemarang.jawapos.com:https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/wonosobo/2019/12/17/kades-harus-fokus-di-kemiskinan/>. Diakses pada tanggal 1 September 2020. pukul 15:18 WIB.
- <http://prodeskel.binapemdes.kemendagri.go.id/mdesa/>. Diakses pada tanggal 25 September 2020. pukul 20:09 WIB.
- Sunandar, A. (2019, Maret 27). "Kabupaten Wonosobo Duduki Kabupaten Termiskin se Jateng". <https://wonosobo.sorot.com:https://wonosobo.sorot.co/berita-3386-kabupaten-wonosobo-duduki-kabupaten-termiskin-se-jateng.html>. Diakses pada tanggal 1 September 2020. pukul 20:22 WIB.

#### Sumber lain:

- RPJMDesa Purwosari Kecamatan Kaliwiro Kabupaten Wonosobo Tahun 2019-2024
- Data Profil Potensi dan Perkembangan Desa Purwosari 2018- 2021
- Data Penerima Bantuan Sosial Desa Purwosari 2018- 2021